



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2020
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mempercepat tercapainya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dilakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan memberikan payung hukum dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional perlu adanya pengaturan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Grand Design* BNN 2018-2045 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 362);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun.

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi Badan Narkotika Nasional untuk menetapkan dan menjalankan program pada level Makro, Meso dan Mikro.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. analisis lingkungan strategis;
 - d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024;
 - e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan
 - f. penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 422 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Visi Reformasi Birokrasi 2025 **“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KELAS DUNIA”**, Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyusun sebuah Grand Desain Reformasi Birokrasi yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010. Perpres tersebut menjadi landasan bagi semua instansi pemerintahan baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Secara periodik arahan dalam Reformasi Birokrasi periode 2010-2014 mengarahkan penyelenggaraan pemerintah pada *Rule Based Bureucracy*, artinya dengan kondisi birokrasi yang ada pada saat itu, penyelenggaraan birokrasi yang jelas dan berlandaskan pada dasar hukum yang kuat merupakan tujuan yang harus dicapai pada periode tersebut. Masuk ke periode 2015-2019, *Performance Based Bureucracy* menjadi *guidance line* birokrasi yang dimaksudkan untuk memperkuat kinerja birokrasi dalam rangka mempersiapkan diri dalam mencapai tujuan pada periode 2020-2025 yakni *Dynamic Governance*.

Sasaran 5 tahunan dari Reformasi Birokrasi secara nasional sendiri terus dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pada periode 2010-2014, sasaran Reformasi Birokrasi Nasional disertai dengan indikator kinerja keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Opini WTP atas LK
 - b. Tingkat Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Nasional
 - b. Indeks Profesionalitas ASN
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Integritas Nasional
 - b. Survey Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya pada periode 2015-2019, sasaran Reformasi Birokrasi disertai dengan indikator kinerja keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Opini WTP atas LK
 - b. Tingkat Kapabilitas APIP
 - c. Maturitas SPIP
 - d. Skor B atas SAKIP
 - e. Penggunaan E-Procurement atas belanja pengadaan
2. Birokrasi yang efektif dan efisien, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Nasional

- b. Indeks Professionalitas ASN
 - c. Indeks E-Gov Nasional
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, dengan indikator sebagai berikut:
- a. Indeks Integritas Nasional
 - b. Survey Kepuasan Masyarakat
 - c. Presentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Hal ini jelas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Terdapat dua prioritas kerja Presiden RI 2020-2024 yang memiliki koherensi dengan area Reformasi Birokrasi. Pertama yakni prioritas tentang **“segala bentuk kendala regulasi yang harus dipotong”** yang dapat dilakukan intervensi melalui Program Penataan Perundang-undangan serta arahan **“penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran”** yang mencakup keseluruhan area Reformasi Birokrasi. Arahan Presiden tersebut harus mampu diterjemahkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan birokrasi ke depan. Apa yang menjadi kendala utamanya dalam hal inefisiensi regulasi, penataan organisasi dan manajemen sumber daya manusia, hingga kendala akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang selama ini cukup kuat sebagai isu birokrasi di Badan Narkotika Nasional harus segera terselesaikan dalam 5 tahun ke depan.

Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu institusi K/L dalam penyelenggaraan pemerintahan harus melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai pelaksana institusional pada tingkat Mikro. Melaksanakan amanat Reformasi Birokrasi diperkuat untuk periode 5 tahun ke depan seiring dengan arahan Kepala Negara terpilih yang beberapa diantaranya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi. Selain menerjemahkan arahan Presiden dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk 5 tahun ke depan, Badan Narkotika Nasional juga harus memperhatikan arah kebijakan Reformasi Birokrasi ke

depan berdasarkan apa yang telah termaktub dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional.

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang bertujuan *Dynamic Governance* pada 2025, maka Badan Narkotika Nasional harus menjadi organisasi yang tangguh serta adaptif terhadap dinamika ekologi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, asas yang akan dikedepankan adalah **Fokus** dan **Prioritas**. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti Badan Narkotika Nasional akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Untuk periode 2020-2024 Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional akan mengacu sasaran yang ditetapkan dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2020-2024 sehingga seirama dalam pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode selanjutnya.

A. Program Manajemen Perubahan

Dalam menginventarisir kondisi, permasalahan dan pencapaian program manajemen perubahan, didapatkan permasalahan pada tim reformasi birokrasi, roadmap reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi, serta perubahan pola pikir budaya. Berikut merupakan kondisi, permasalahan dan pencapaian program manajemen perubahan selama periode tahun 2015-2019:



Gambar 1. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Program Manajemen Perubahan Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Program Manajemen Perubahan Badan Narkotika Nasional dipengaruhi oleh peran instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota wajib menjalankan program manajemen perubahan untuk mengarustamakan reformasi birokrasi di Badan Narkotika Nasional hingga instansi vertikal.

B. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menginventarisir kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, didapatkan permasalahan pada Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan kondisi, permasalahan dan pencapaian program Penataan Peraturan Perundang-Undangan selama periode tahun 2015-2019:

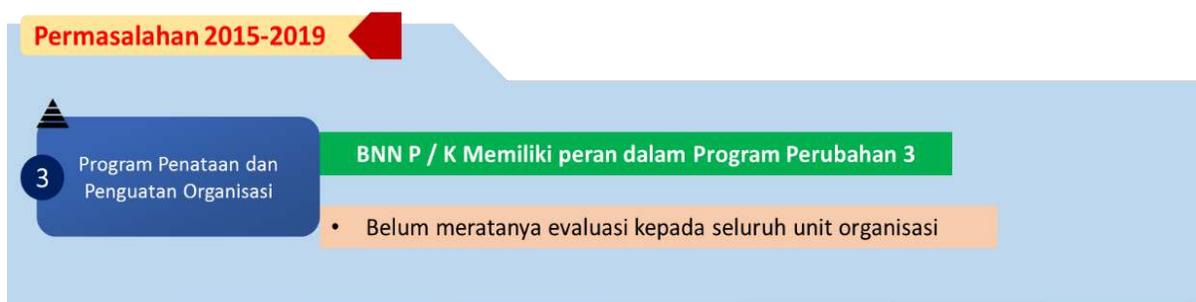


Gambar 2. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Program penataan peraturan perundang-undangan yang tidak melalui proses harmonisasi berpotensi untuk terjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya sehingga diperlukan kerja sama yang baik antar satuan kerja, Kementerian / Lembaga lainnya.

C. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam menginventarisir kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan dan Penguatan Organisasi, didapatkan permasalahan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam penataan dan penguatan organisasi. Berikut merupakan kondisi, permasalahan dan pencapaian program Penataan dan Penguatan Organisasi selama periode tahun 2015-2019:

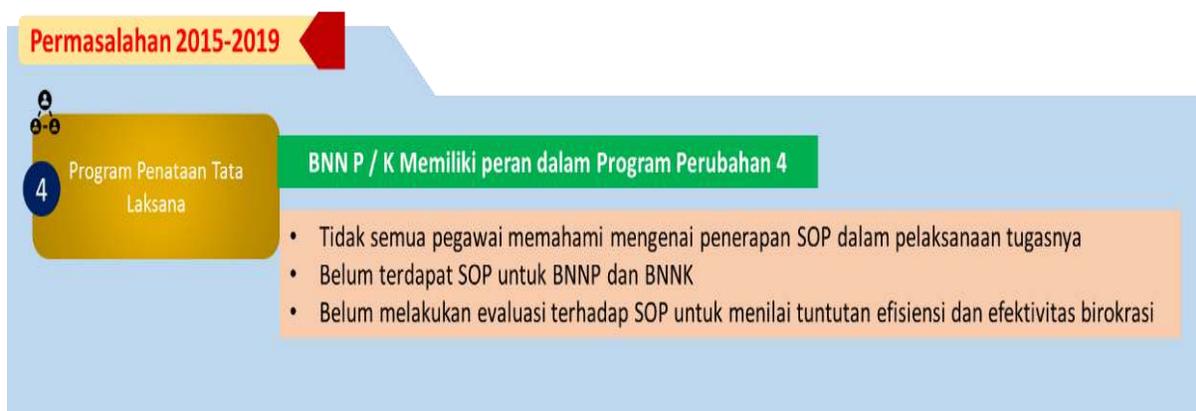


Gambar 3. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Program Penataan dan Penguatan Organisasi Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Program Penataan dan Penguatan Organisasi Badan Narkotika Nasional juga dipengaruhi oleh peran instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota wajib menjalankan Program Penataan dan Penguatan Organisasi untuk mengarustamakan reformasi birokrasi di Badan Narkotika Nasional hingga instansi vertikal.

D. Program Penataan Tatalaksana

Dalam menginventarisir kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan Tatalaksana, didapatkan permasalahan pada semua upaya penataan tatalaksana di Badan Narkotika Nasional. Berikut merupakan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan Tatalaksana selama periode tahun 2015-2019:



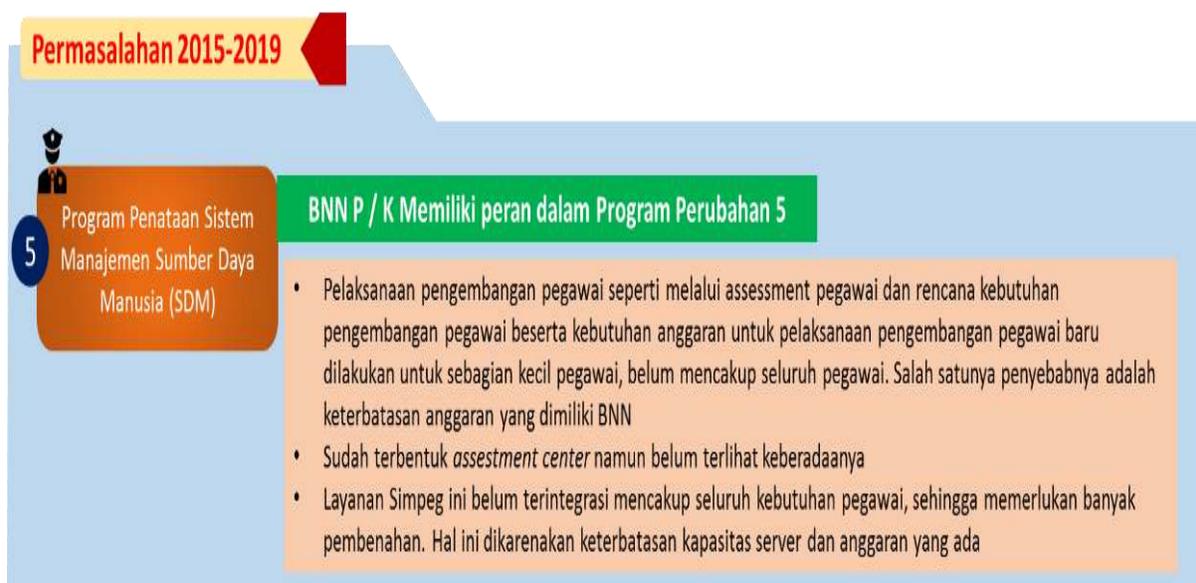
Gambar 4. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Program Penataan Tatalaksana Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Program Penataan Tatalaksana Badan Narkotika Nasional juga dipengaruhi oleh peran instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota wajib menjalankan Program Penataan Tatalaksana

untuk mengarustamakan reformasi birokrasi di Badan Narkotika Nasional hingga instansi vertikal.

E. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menginventarisir kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), didapatkan permasalahan pada semua upaya penataan sistem manajemen sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional. Berikut merupakan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) selama periode tahun 2015-2019:



Gambar 5. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Narkotika Nasional juga dipengaruhi oleh peran instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota wajib menjalankan Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengarustamakan reformasi birokrasi di Badan Narkotika Nasional hingga instansi vertikal.

F. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam menginventarisir kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, didapatkan permasalahan pada semua upaya penguatan akuntabilitas kinerja di Badan Narkotika Nasional. Berikut

merupakan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja selama periode tahun 2015-2019:

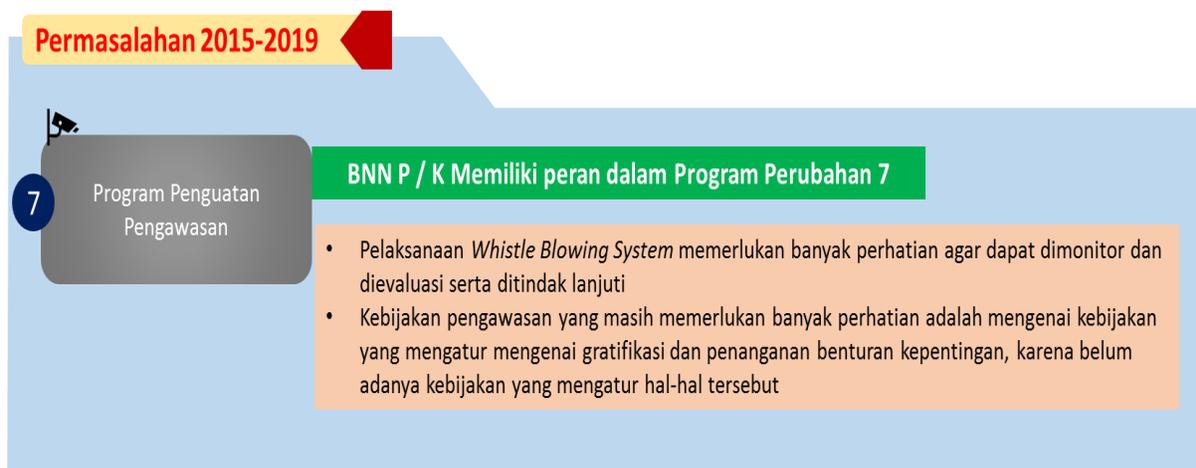


Gambar 6. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional juga dipengaruhi oleh peran instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota wajib menjalankan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja untuk mengarustamakan reformasi birokrasi di Badan Narkotika Nasional hingga instansi vertikal.

G. Program Penguatan Pengawasan

Dalam menginventarisir kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penguatan Pengawasan, didapatkan permasalahan pada semua upaya penguatan pengawasan di Badan Narkotika Nasional. Berikut merupakan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penguatan Pengawasan selama periode tahun 2015-2019:



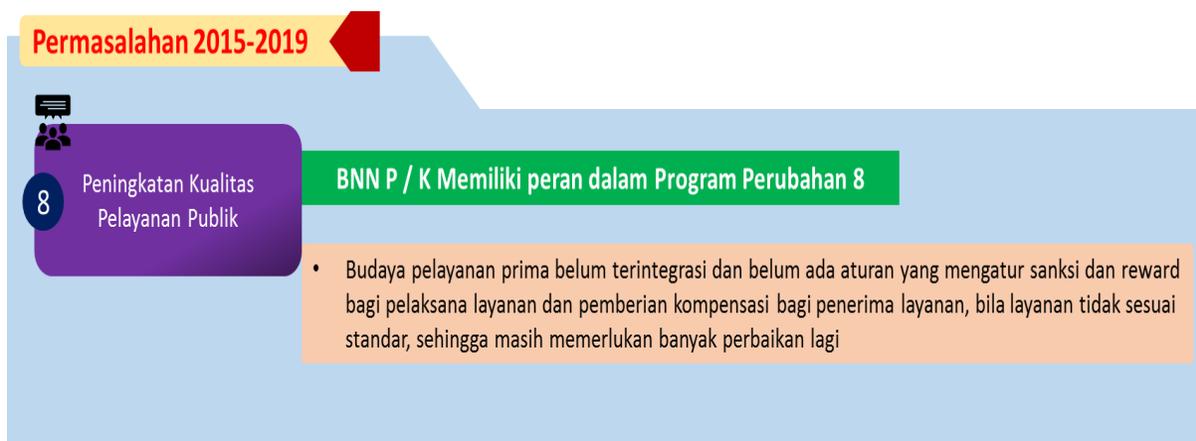
Gambar 7. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Program Penguatan Pengawasan Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Program Penguatan Pengawasan Badan Narkotika Nasional juga dipengaruhi oleh peran instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota wajib menjalankan Program Penguatan Pengawasan untuk mengarustamakan reformasi birokrasi di Badan Narkotika Nasional hingga instansi vertikal.

H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam menginventarisir kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, didapatkan permasalahan pada semua upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Badan Narkotika Nasional. Berikut merupakan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik selama periode tahun 2015-2019:



Gambar 8. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Badan Narkotika Nasional juga dipengaruhi oleh peran instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota wajib menjalankan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk mengarustamakan reformasi birokrasi di Badan Narkotika Nasional hingga instansi vertikal.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah *context* (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* ini adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

A. Politisasi Dan Kooptasi Birokrasi

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

B. Penegakan Dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi

Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam kebijakan dan regulasi yang tegas.

C. Administrasi Dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

D. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

E. Globalisasi Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan "*Big Data*", pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan

artificial intelligence di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.c

F. Revolusi Industri 4.0

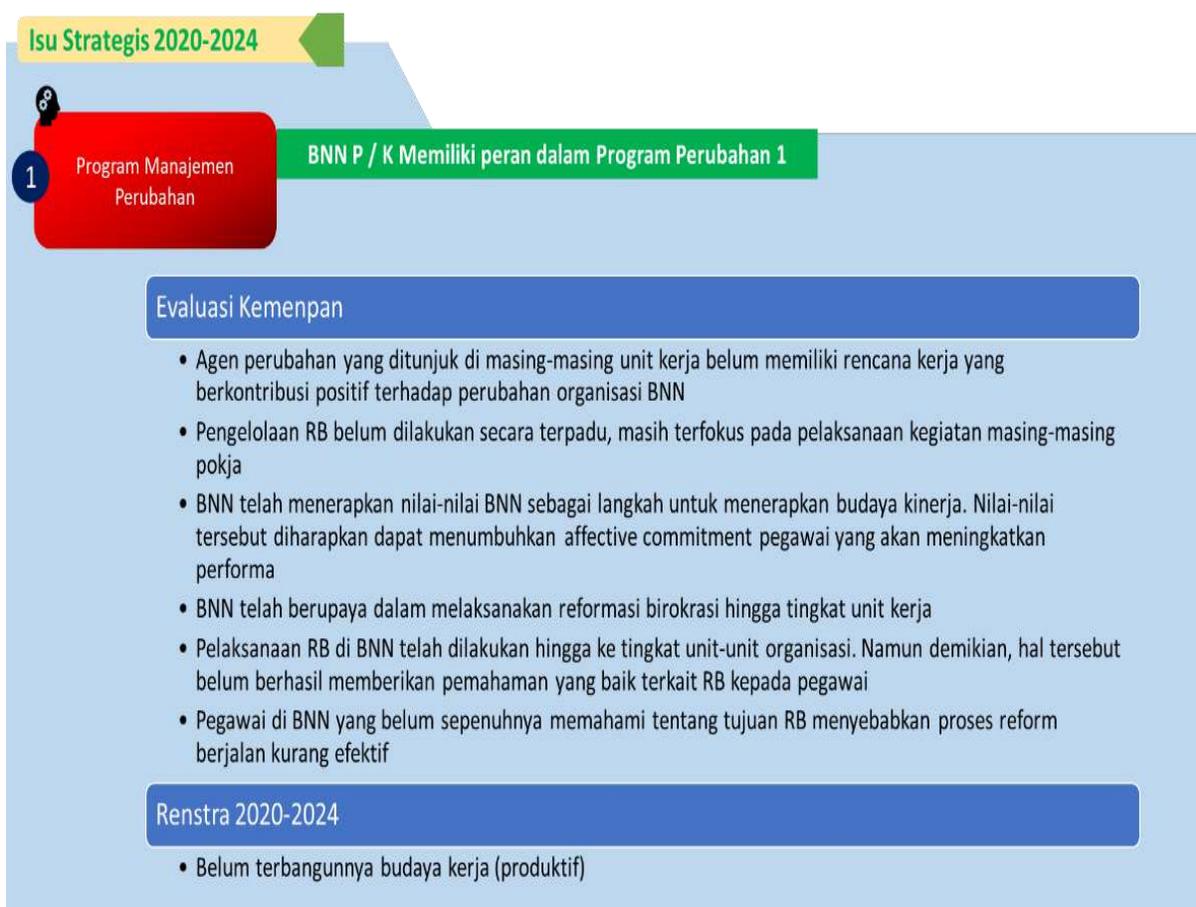
Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

2. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Program Manajemen Perubahan

Isu strategis yang berasal dari eksternal organisasi yang perlu ditekankan untuk Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 juga diidentifikasi sebagai berikut:



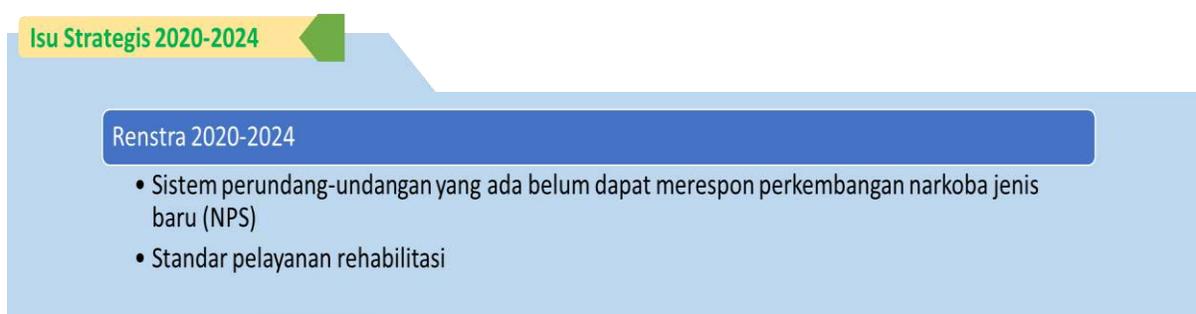
Gambar 9. Isu Strategis Program Manajemen Perubahan Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Manajemen perubahan dilakukan agar proses reformasi birokrasi berjalan efektif sehingga organisasi Badan Narkotika Nasional pun akan ikut bergerak ke arah yang lebih baik. Badan Narkotika Nasional saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka pengelolaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara terpadu hingga tingkat unit kerja. Pelaksanaan reformasi birokrasi sampai ke tingkat unit kerja merupakan langkah awal dalam memberikan pemahaman mengenai tujuan reformasi birokrasi kepada para pegawai Badan Narkotika Nasional sehingga unit-unit kerja akan memberikan kontribusi positif terhadap perubahan organisasi Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pencapaian program manajemen perubahan pada tahun 2015-2019 serta dilengkapi dengan isu strategis yang akan dijalani pada periode 2020-2024, diharapkan perumusan konsolidasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional untuk periode 2020-2024 dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

B. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Isu strategis yang berasal dari eksternal organisasi yang perlu ditekankan untuk Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 juga diidentifikasi sebagai berikut:



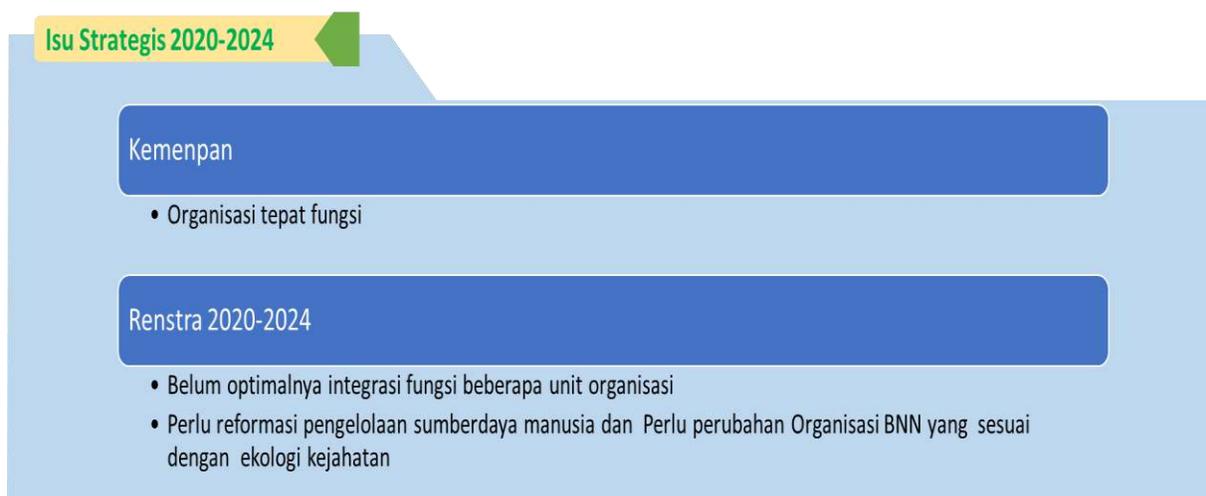
Gambar 10. Isu Strategis Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan agar sistem perundang-undangan dapat merespon perkembangan kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penataan peraturan perundang-undangan harus dapat bergerak cepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Harmonisasi dengan satuan-satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional serta Kementerian/Lembaga lainnya mutlak diperlukan guna menjawab tantangan reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2015-2019 serta dilengkapi dengan isu strategis yang akan dijalani pada periode 2020-2024, diharapkan perumusan konsolidasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional untuk periode 2020-2024 dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

C. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Isu strategis yang berasal dari eksternal organisasi yang perlu ditekankan untuk Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 juga diidentifikasi sebagai berikut:



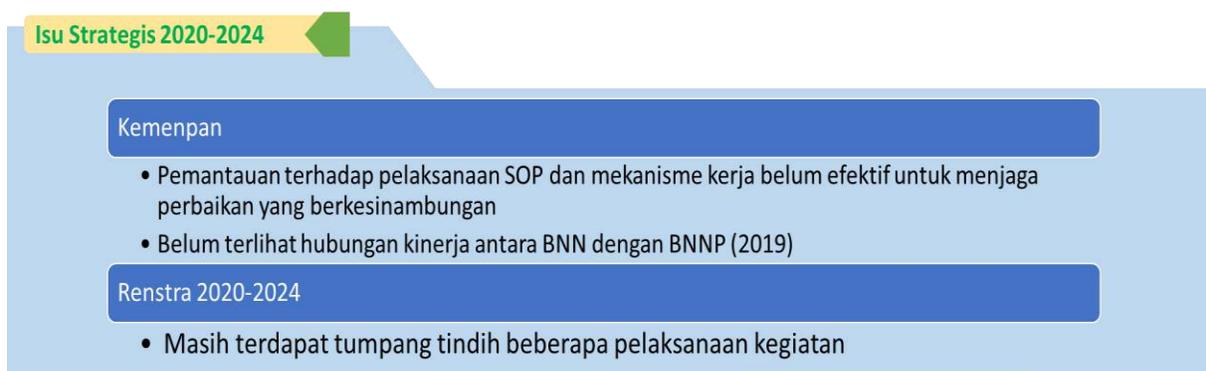
Gambar 11. Isu Strategis Program Penataan dan Penguatan Organisasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Badan Narkotika Nasional saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan dan Penguatan Organisasi pada tahun 2015-2019 serta dilengkapi dengan isu strategis yang akan dijalani pada periode 2020-2024, diharapkan perumusan konsolidasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional untuk periode 2020-2024 dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

D. Program Penataan Tatalaksana

Isu strategis yang berasal dari eksternal organisasi yang perlu ditekankan untuk Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 juga diidentifikasi sebagai berikut:



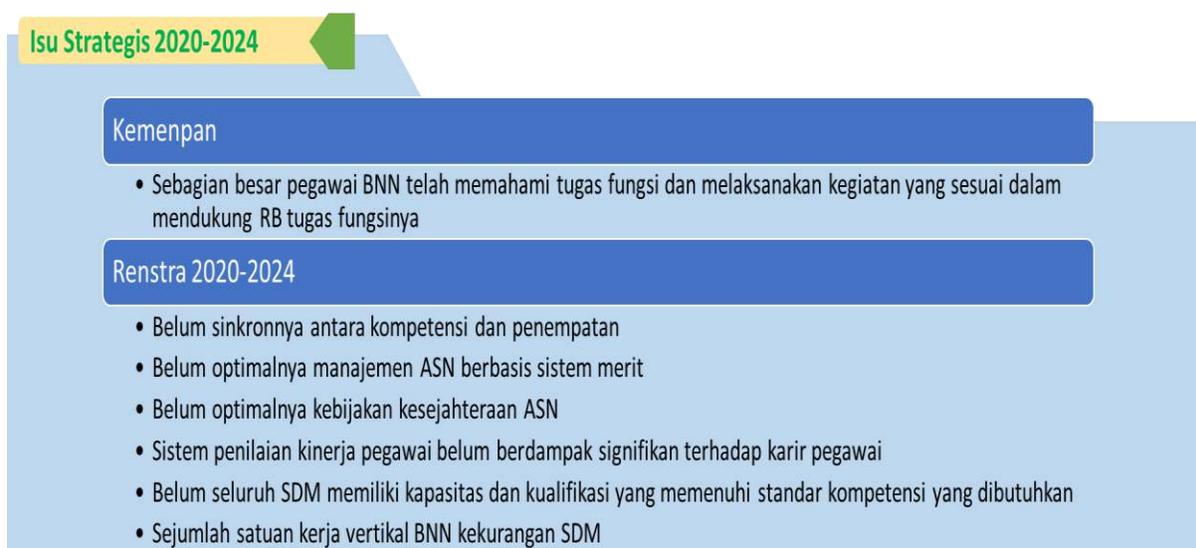
Gambar 12. Isu Strategis Program Penataan Tatalaksana Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Penataan tata laksana dilakukan agar proses reformasi birokrasi berjalan efektif dari mulai Badan Narkotika Nasional Pusat sampai dengan Badan Narkotika Nasional provinsi/kota/kabupaten sehingga organisasi Badan Narkotika Nasional secara keseluruhan pun akan ikut bergerak seirama ke arah yang lebih baik. Badan Narkotika Nasional saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penataan tata laksana berupa proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja antara Badan Narkotika Nasional Pusat sampai dengan Badan Narkotika Nasional provinsi/kota/kabupaten harus ada dan ditetapkan sebagai acuan. Pemantauan terhadap pelaksanaan SOP di seluruh unit kerja diperlukan untuk memastikan mekanisme kerja berjalan sesuai dengan koridornya sehingga efektifitas kinerja Badan Narkotika Nasional dapat terukur dengan baik karena tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan Tatalaksana pada tahun 2015-2019 serta dilengkapi dengan isu strategis yang akan dijalani pada periode 2020-2024, diharapkan perumusan konsolidasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional untuk periode 2020-2024 dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

E. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Isu strategis yang berasal dari eksternal organisasi yang perlu ditekankan untuk Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 juga diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 13. Isu Strategis Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai Badan Narkotika Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Narkotika Nasional saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan manajemen pegawai yang efektif dan efisien sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Pengoptimalisasian pegawai sesuai dengan manajemen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan secara maksimal guna mendorong Badan Narkotika Nasional menjadi organisasi yang berkualitas.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2015-2019 serta dilengkapi dengan isu strategis yang akan dijalani pada periode 2020-2024, diharapkan perumusan konsolidasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional untuk periode 2020-2024 dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

F. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Isu strategis yang berasal dari eksternal organisasi yang perlu ditekankan untuk Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 juga diidentifikasi sebagai berikut:

Isu Strategis 2020-2024

Kemenpan

- Peran pimpinan secara berjenjang dalam meningkatkan budaya kinerja di setiap unit BNN belum optimal
- Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang telah dibangun belum merata sampai ke level unit
- Roadmap RB belum diintegrasikan dengan Renstra
- Kinerja yang dimandatkan kepada BNN belum sepenuhnya dijadikan sebagai IKU
- Masih terdapat definisi kinerja berorientasi proses sehingga belum sepenuhnya mendukung kinerja yang diharapkan dari jabatan tersebut
- Masih terdapat definisi kinerja yang belum selaras antara atasan dan bawahan
- Terdapat penentuan indikator dan target kinerja yang tidak sesuai dengan kinerja yang didefinisikan
- Belum terlihat hubungan kinerja antara BNN dengan BNNP
- Penetapan Kinerja telah diterapkan hingga Eselon II, sedangkan pegawai di bawahnya hanya menggunakan SKP yang berisi tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut menyebabkan pegawai memahami pekerjaan yang dilaksanakan tapi tidak memahami apa yang ingin dihasilkan dari kegiatan tersebut
- Akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan serta disiplin pegawai belum dijamin penuh oleh Ittama

Gambar 14. Isu Strategis Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penguatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional sehingga rencana strategis organisasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan target pencapaian.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2015-2019 serta dilengkapi dengan isu strategis yang akan dijalani pada periode 2020-2024, diharapkan perumusan konsolidasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional untuk periode 2020-2024 dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

G. Program Penguatan Pengawasan

Isu strategis yang berasal dari eksternal organisasi yang perlu ditekankan untuk Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 juga diidentifikasi sebagai berikut:

Isu Strategis 2020-2024

Kemenpan

- Pembangunan zona integritas oleh beberapa unit kerja sudah mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
- Indeks Integritas BNN 2018 adalah 3,22 masih dibawah nilai Ideal menurut Permenpan RB 3,60
- Implementasi pengembangan manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, whistle blowing system, serta penanganan gratifikasi belum optimal
- Indeks Integritas BNN 2019 adalah 3,32 masih dibawah nilai Ideal menurut Permenpan RB 3,60

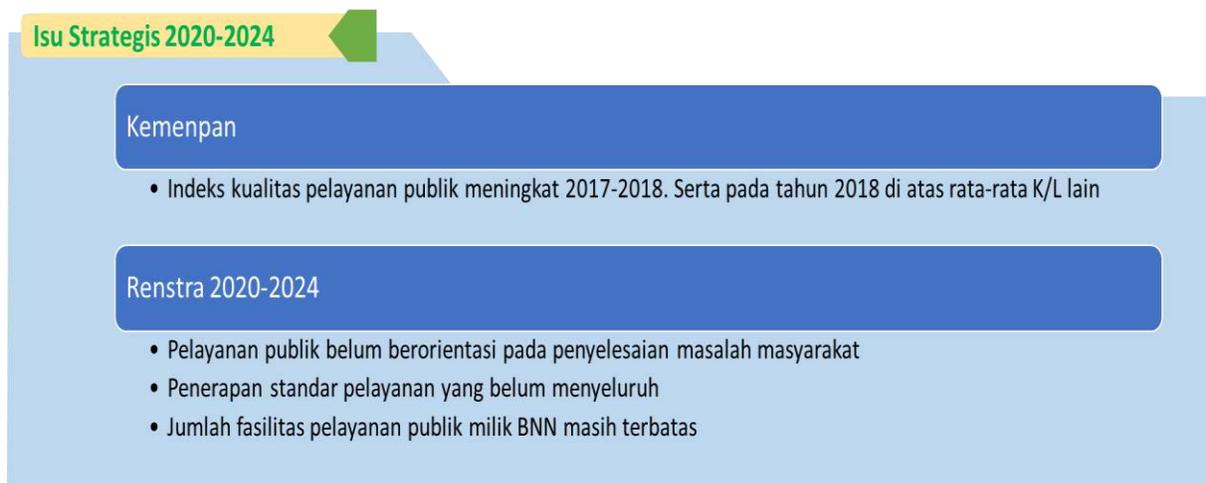
Gambar 15. Isu Strategis Program Penguatan Pengawasan Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Penguatan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penguatan pengawasan menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Program Penguatan Pengawasan pada tahun 2015-2019 serta dilengkapi dengan isu strategis yang akan dijalani pada periode 2020-2024, diharapkan perumusan konsolidasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional untuk periode 2020-2024 dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Isu strategis yang berasal dari eksternal organisasi yang perlu ditekankan untuk Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 juga diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 16. Isu Strategis Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Berdasarkan kondisi, permasalahan dan pencapaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2015-2019 serta dilengkapi dengan isu strategis yang akan dijalani pada periode 2020-2024, diharapkan perumusan konsolidasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan Narkotika Nasional untuk periode 2020-2024 dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang ada.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

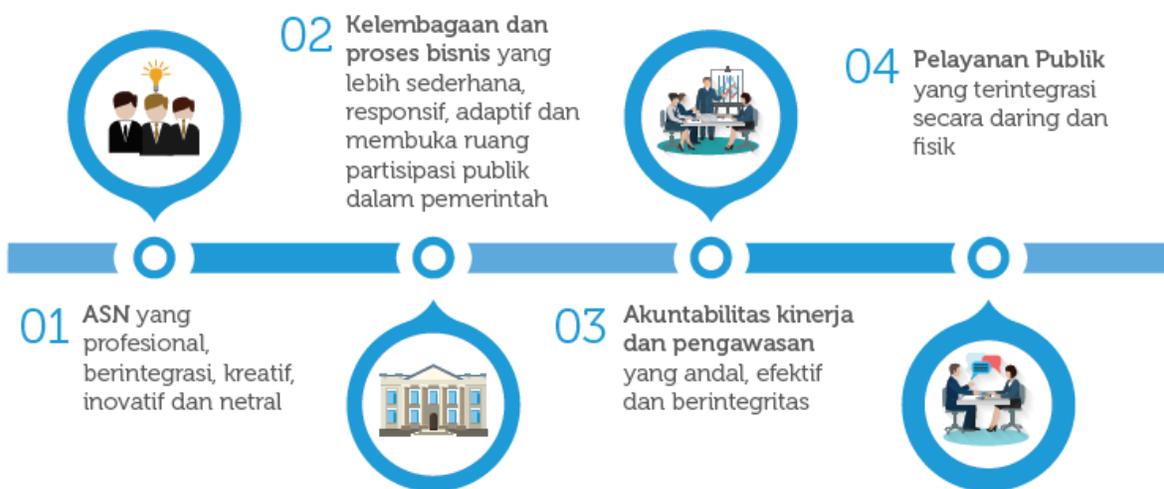
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan

A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional 2020-2024

1. RPJMN 2020-2024

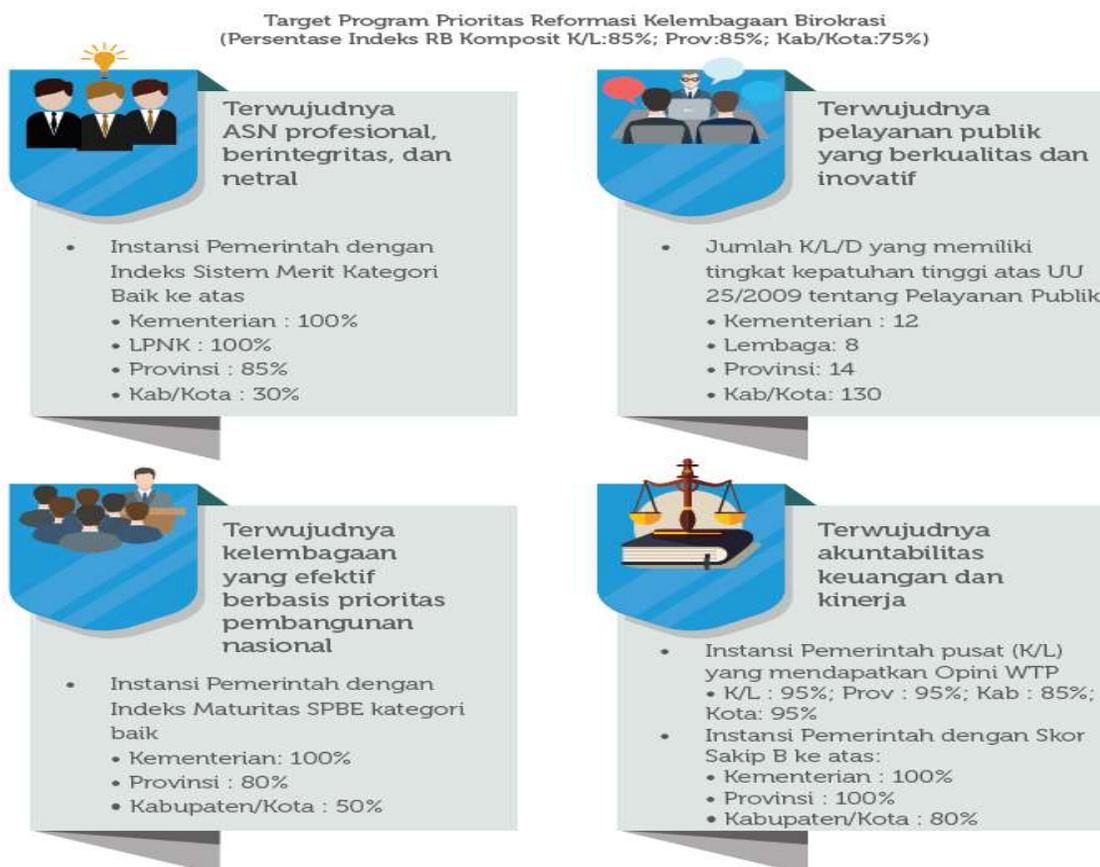
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024, terdapat 4 isu strategis yang dikemukakan berkaitan dengan Reformasi Birokrasi sebagai kacamata kebijakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 5 tahun kedepan. Berikut uraian isu tersebut:



Gambar 17. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

ASN yang professional, berintegrasi, kreatif, inovatif dan netral merupakan isu strategis pertama yang dikemukakan, hal ini mengindikasikan dalam 5 tahun kedepan area manajemen perubahan yang mampu merubah *mindset* ASN sesuai dengan arah kebijakan Reformasi

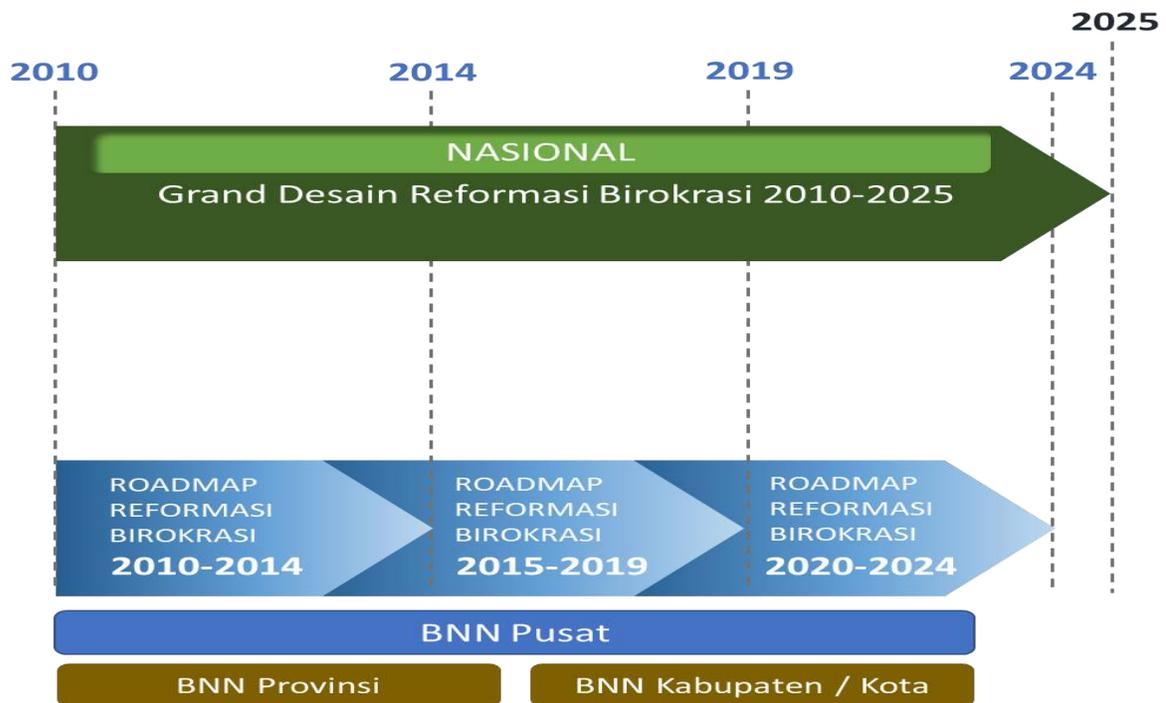
Birokrasi menjadi prioritas dalam pelaksanaannya. Selanjutnya kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang partisipasi publik dalam pemerintah. Point dalam isu kedua yang ingin ditekankan adalah simplifikasi birokrasi dari segi kelembagaan dan proses bisnis, dari hal tersebut diharapkan pemerintahan yang partisipatif dapat terlaksana. Intervensi yang dilakukan dalam isu ini nantinya akan meliputi Program penataan ketatalaksanaan serta Program penataan dan penguatan organisasi yang juga akan menjadi prioritas 5 tahun kedepan. Isu strategis ketiga adalah Akuntabilitas Kinerja dan pengawasan yang andal, efektif dan berintegritas. Dengan terus dikemukakanya isu mengenai akuntabilitas dan pengawasan, secara konsekutif akan menghasilkan arah kebijakan yang mengarah kepada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Isu strategis yang keempat adalah pelayanan public yang terintegrasi secara daring dan fisik yang artinya disini secara nasional telah semakin sadar akan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan public, namun tidak lepas dari tujuan utamanya yakni memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dari isu-isu tersebut, RPJMN 2020-2024 memiliki target berikut yang harus dicapai, Badan Narkotika Nasional sebagai institusi Lembaga non kementerian wajib mendukung ketercapaiannya. Berikut merupakan target tersebut:



Gambar 18. Target Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

2. Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional harus menjadi acuan setiap institusi pemerintahan dalam menyelenggarakan Reformasi Birokrasi yang dioperasionalisasikan melalui Roadmap Reformasi Birokrasi masing-masing institusi. Apa-apa yang menjadi sasaran, hal-hal yang diutamakan, kebijakan-kebijakan yang ditekankan dalam *grand desain* Reformasi Birokrasi pada tahun berkaitan harus memberi *leverage* kepada Roadmap Reformasi Birokrasi.



Gambar 19. Roadmap RB sebagai operasionalisasi dari Rancangan Induk pada Grand Desain RB

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada *Road Map* periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari *Road Map* periode sebelumnya. Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Adapun diantara hal yang masih tetap dipertahankan dari *Road Map* periode sebelumnya adalah pengorganisasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedalam tingkatan nasional dan instansional serta pelaksanaan *quickwin* pada tingkatan nasional dan instansional.

B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: *Ease of Doing Business* (Kemudahan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, *Corruption Perceptions Index* (Indeks Persepsi Korupsi) oleh *Transparency International*, *Government Effectiveness Index* (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh Bank Dunia, dan *Trust Barometer* oleh Edelman. Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap indikator tersebut juga akan dievaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

C. Sasaran Reformasi Birokrasi

Penyusunan roadmap reformasi birokrasi suatu Lembaga harus memperhatikan sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Grand Desain Reformasi birokrasi pada periode berkaitan. Sasaran 5 tahunan dari Reformasi Birokrasi secara nasional sendiri terus dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pada periode 2010-2014, sasaran Reformasi Birokrasi Nasional disertai dengan indikator kinerja keberhasilannya adalah sebagai Berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Opini WTP atas LK
 - b. Tingkat Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Nasional
 - b. Indeks Profesionalitas ASN
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Integritas Nasional
 - b. Survey Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya pada periode 2015-2019, sasaran Reformasi Birokrasi disertai dengan indikator kinerja keberhasilannya adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Opini WTP atas LK
 - b. Tingkat Kapabilitas APIP
 - c. Maturitas SPIP
 - d. Skor B atas SAKIP
 - e. Penggunaan E-Procurement atas belanja pengadaan
2. Birokrasi yang efektif dan efisien, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata Nasional
 - b. Indeks Profesionalitas ASN
 - c. Indeks E-Gov Nasional
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Integritas Nasional
 - b. Survey Kepuasan Masyarakat
 - c. Presentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik

Untuk periode 2020-2024 Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional akan mengacu sasaran yang ditetapkan dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi

D. Program-Program

Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri.

1. Program Manajemen Perubahan

Pada program manajemen perubahan terdapat beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

1.1. Kegiatan

Kegiatan pada program manajemen perubahan meliputi:

1) Penentuan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi periode 2015-2019

- b) Penyusunan tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan tim reformasi birokrasi sebagai rencana kerja periode 2020-2024
 - c) Pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi
 - d) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi untuk ditindaklanjuti.
- 2) Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024
Sub kegiatan ini mencakup penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan dengan melibatkan seluruh satuan unit kerja dan penyusunan Quick Wins Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
 - b) Sub kegiatan ini meliputi sosialisasi hasil Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024 kepada seluruh unit kerja baik pusat maupun Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - c) Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi
Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024 dilakukan secara berkala setiap dua tahun sekali, yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2024.
- 3) Perubahan Pola Pikir
- Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:
- a) Penetapan agen perubahan
 - b) Penetapan agen penggerak perubahan
 - c) Penguatan agen perubahan
 - d) Penguatan agen penggerak perubahan
 - e) Menyusun kurikulum pendidikan terkait dengan pola pikir dan budaya kerja
 - f) Penyusunan instrumen pengukuran perubahan organisasi
 - g) Penyusunan dan penyiapan pelaksanaan komunikasi reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional
 - h) Sosialisasi kode etik
- 4) Perubahan Budaya Kerja

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Melakukan pengukuran perubahan budaya organisasi

- b) Penyusunan Blueprint penguatan budaya organisasi Badan Narkotika Nasional
 - c) Pembinaan mental dan rohani
 - d) Revisi Perka tentang kepegawaian Badan Narkotika Nasional
 - e) Penerapan budaya organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional (*culture event*)
- 5) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
- Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:
- a) Pengelolaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - b) Pengembangan kapasitas asesor reformasi birokrasi
 - c) Rapat koordinasi asesor reformasi birokrasi terhadap kertas kerja
 - d) Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)
- 6) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Perubahan

1.2. Indikator Kinerja

Tabel 1. Program Manajemen Perubahan disertai Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
Program Manajemen Perubahan	Penentuan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi	Terlaksananya tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan
	Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024	Tersusun dan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024	Reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik
	Perubahan pola pikir	Tersusunnya instrumen dan metode perubahan pola pikir di lingkungan Badan Narkotika	Berubahnya pola pikir dan etika personal di tiap-tiap unit kerja Badan Narkotika

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
		Nasional	Nasional yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
	Perubahan budaya kerja	Tersusunnya peraturan, instrumen, dan kegiatan perubahan budaya kerja	Berubahnya budaya kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional ke arah yang lebih baik
	Pemantauan dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional	Road Map Reformasi Birokrasi yang lebih efektif dan efisien
	Monitoring dan evaluasi manajemen perubahan	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi manajemen perubahan	Program area manajemen perubahan yang lebih efektif dan efisien

1.3. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Waktu dan Pelaksanaan dan Penanggungjawab Program Manajemen Perubahan

Program Manajemen Perubahan							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penentuan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi	Evaluasi pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi	Biro Kepegawaian	√				

Program Manajemen Perubahan							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	birokrasi periode 2015-2019						
	Penyusunan tugas-tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan tim reformasi birokrasi sebagai rencana kerja periode 2020-2024	Biro Kepegawaian	√				
	Pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
	Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kewajiban tim reformasi birokrasi untuk ditindaklanjuti	Biro Kepegawaian			√		√
Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2020-2024	Penyusunan Road Map RB Badan Narkotika Nasional 2020-2024	Biro Kepegawaian	√				
	Sosialisasi Road Map RB	Biro Kepegawaian	√				
	Evaluasi Road Map RB	Biro Kepegawaian			√		√
Perubahan pola pikir	Penetapan agen perubahan	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
	Penetapan agen penggerak perubahan	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
	Penguatan agen perubahan	PPSDM	√	√	√	√	√

Program Manajemen Perubahan							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penguatan agen penggerak perubahan	PPSDM	√	√	√	√	√
	Menyusun kurikulum pendidikan terkait dengan pola pikir dan budaya kerja	PPSDM	√				
	Penyusunan instrumen pengukuran perubahan budaya organisasi	Biro Kepegawaian			√		√
	Penyusunan dan penyiapan pelaksanaan komunikasi reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional	Biro Kepegawaian	√				
	Sosialisasi kode etik	Inspektorat Utama	√	√	√	√	√
Perubahan budaya kerja	Melakukan pengukuran perubahan budaya organisasi	Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Penyusunan Blueprint penguatan budaya organisasi Badan Narkotika Nasional	Biro Kepegawaian		√			
	Pembinaan mental dan rohani	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
	Revisi Perka	Biro			√		

Program Manajemen Perubahan							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional	Kepegawaian					
	Penerapan budaya organisasi di lingkungan BNN (<i>culture event</i>)	BNN, BNNP, BNNK	√	√	√	√	√
Pemantauan dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	Pengelolaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Utama	√	√	√	√	√
	Pengembangan kapasitas asesor	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
	Rapat koordinasi asesor Reformasi Birokrasi terhadap kertas kerja	Inspektorat Utama	√	√	√	√	√
	Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut	Inspektorat Utama	√	√	√	√	√
Monitoring dan evaluasi manajemen perubahan		Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pada program penataan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

2.1. Kegiatan

Kegiatan pada program penataan peraturan perundang-undangan meliputi:

1) Analisis dan evaluasi produk hukum

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Identifikasi dan analisa terhadap produk P4GN
- b) Monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum P4GN

- 2) Harmonisasi setiap produk hukum P4GN
Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah kajian analisa dan pemetaan produk hukum
- 3) Evaluasi peraturan Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum
Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah penyesuaian peraturan Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2018 dengan Permenkumham No. 23 Tahun 2018
- 4) Optimalisasi JDIH P4GN
Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:
 - a) Pendokumentasian produk-produk hukum JDIH
 - b) Sosialisasi JDIH P4GN

2.1. Indikator Kinerja

Tabel 3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan disertai Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
Program penataan peraturan perundang-undangan	Analisis dan evaluasi produk hukum	Tersedianya hasil analisis dan evaluasi produk hukum	Tersedianya produk hukum yang mendukung pelaksanaan P4GN
	Harmonisasi setiap produk hukum P4GN	Tersusunnya dokumen identifikasi dan analisa terhadap produk hukum P4GN dan tersedianya laporan monev	Produk hukum P4GN yang harmonis
	Evaluasi peraturan Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum	Tersusunnya peraturan Badan Narkotika Nasional yang sesuai dengan Permenkumham No. 23 Tahun 2018	Tersusunnya produk hukum Badan Narkotika Nasional yang sesuai dengan acuan
	Optimalisasi	Tersedianya	Tersosialisasikannya

	JDIH P4GN	JDIH P4GN yang dapat diakses oleh masyarakat	produk hukum P4GN kepada masyarakat
--	-----------	--	-------------------------------------

2.3. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Waktu dan Pelaksanaan dan Penanggungjawab Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Analisis dan evaluasi produk hukum	Identifikasi dan analisa terhadap produk hukum P4GN	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	√	√	√	√	√
	Monitoring dan evaluasi terhadap produk hukum P4GN	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	√	√	√	√	√
Harmonisasi setiap produk hukum P4GN	Kajian analisa dan pemetaan produk hukum	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	√	√	√	√	√
Evaluasi peraturan Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum	penyesuaian peraturan Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2018 dengan Permenkumham No. 23 Tahun 2018	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama		√			
Optimalisasi JDIH P4GN	Pendokumentasian produk-produk hukum JDIH	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	√	√	√	√	√
	Sosialisasi JDIH	Deputi	√	√	√	√	√

	P4GN	Bidang Hukum dan Kerjasama					
--	------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pada program penataan dan penguatan organisasi terdapat beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

3.1 . Kegiatan

Kegiatan pada Program Penataan dan Penguatan Organisasi meliputi:

1) Evaluasi organisasi

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
- b) Pelaksanaan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
- c) Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi
- d) Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok
- e) Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
- f) Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
- g) Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
- h) Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
- i) Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2) Penataan organisasi

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah tindak lanjut evaluasi organisasi

3.2. Indikator Kinerja

Tabel 5. Program Penataan dan Penguatan Organisasi disertai Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
Program Penataan dan Penguatan Organisasi	Evaluasi organisasi	Laporan evaluasi organisasi	Organisasi Badan Narkotika Nasional yang adaptif, efektif, dan efisien
	Penataan organisasi	Surat Usulan Perubahan Organisasi ke Kemenpan	

3.3. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Waktu pelaksanaan dan Penanggungjawab Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program Penataan dan Penguatan Organisasi							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Evaluasi organisasi	Pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Biro Kepegawaian	√				√
	Pelaksanaan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Biro Kepegawaian			√		√
	Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Biro Kepegawaian			√		√
	Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis	Biro Kepegawaian			√		√

Program Penataan dan Penguatan Organisasi							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok						
	Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Biro Kepegawaian			√		√
	Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Biro Kepegawaian			√		√
	Pelaksanaan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	Biro Kepegawaian			√		√
	Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Biro Kepegawaian			√		√
	Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis	Biro Kepegawaian			√		√

Program Penataan dan Penguatan Organisasi							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.						
Penataan organisasi	Tindak lanjut evaluasi organisasi	Biro Kepegawaian			√		√

4. Program Penataan Tatalaksana

Pada program penataan tatalaksana terdapat beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

4.1. Kegiatan

- 1) Penyusunan proses bisnis
- 2) Sosialisasi proses bisnis
- 3) Penyusunan SOP
- 4) Sosialisasi SOP
- 5) Evaluasi dan revisi SOP
- 6) E-office

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Pembuatan e-office
- b) Sosialisasi dan pelatihan e-office
- c) Pengembangan e-office
- d) Monitoring dan evaluasi e-office

7) SRIKANDI (Sistem Rincian Kegiatan Individu)

8) E-monev

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Sosialisasi dan pelatihan e-monev
- b) Pengembangan e-monev
- c) Monitoring dan evaluasi e-monev

9) Integrasi sistem

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Integrasi sistem internal Badan Narkotika Nasional
- b) Integrasi sistem eksternal Badan Narkotika Nasional

c) Integrasi JDIH Badan Narkotika Nasional ke JDIH Nasional

- 10) Pengembangan aplikasi SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba)
- 11) ARENA (Aplikasi Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana)
- 12) Layanan informasi publik
- 13) Pengembangan website JDIH
- 14) Pengembangan website Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten
- 15) Pengembangan website PPID
- 16) Pengelolaan website cegah narkoba
- 17) Pengelolaan radio
- 18) Pengelolaan sosial media pencegahan
- 19) KIE keliling
- 20) Pengendalian website rumah edukasi anti narkoba
- 21) Pengelolaan media sosial Badan Narkotika Nasional
- 22) Evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- 23) Pengelolaan website MADSYS (Manajemen Digital Sistem)
- 24) Pengelolaan website perpustakaan
- 25) Pembuatan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK)

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Pembuatan NSPK layanan informasi
- b) Review dan perbaikan NSPK layanan informasi
- c) Penyusunan pedoman publikasi dan media sosial
- d) Review dan perbaikan pedoman publikasi dan media sosial
- e) Penyusunan panduan dan modul *e-learning*

- 26) Peningkatan dan pengembangan SDM arsiparis

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Pelaksanaan bimtek kearsipan
- b) Pelaksanaan diklat kearsipan

- 27) Revisi regulasi arsiparis

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Pelaksanaan revisi tata naskah dinas peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018
- b) Pelaksanaan revisi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip

- 28) Sosialisasi tata naskah dinas dan klasifikasi arsip

- 29) Pembuatan perka tentang penerbitan dan serah simpan karya cetak dan karya rekam

- 30) Pengawasan kearsipan
- 31) Tata kelola arsip aktif
- 32) Tata kelola arsip inaktif
- 33) Bimbingan teknis arsiparis
- 34) Sosialisasi standar/maklumat pedoman layanan laboratorium
- 35) Pengembangan website sistem layanan laboratorium
- 36) Pembuatan sistem layanan laboratorium online
- 37) Pengembangan sistem layanan laboratorium online
- 38) Pengembangan SIM (Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi)
- 39) Pengembangan SIELIN (Sistem E-Learning Terintegrasi)

4.2. Indikator Kinerja

Tabel 7. Program Penataan Tatalaksana disertai dengan Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
Penataan tata laksana	Penyusunan proses bisnis	Tersusunnya proses bisnis	Efektivitas dan efisiensi tata laksana organisasi
	Sosialisasi proses bisnis	Tersosialisasikannya proses bisnis	
	Penyusunan SOP	Tersusunnya SOP	
	Sosialisasi SOP	Tersosialisasikannya SOP	
	Evaluasi dan revisi SOP	Dokumen hasil evaluasi dan revisi SOP	
	e-office	Tersusunnya aplikasi e-office	
	SRIKANDI	Tersusunnya aplikasi SRIKANDI	
	e-monev	Tersusunnya aplikasi e-monev	
	Integrasi sistem	Terintegrasinya sistem	
	SIRENA	Tersusunnya aplikasi SIRENA	
	ARENA	Tersusunnya aplikasi ARENA	
	Layanan informasi publik	Layanan informasi publik yang mudah diakses masyarakat	Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik
	Pengembangan website JDIH	Website JDIH yang mudah diakses oleh masyarakat	
Pengembangan website BNN, BNNP, BNNK	Website BNN, BNNP, BNNK yang mudah diakses oleh masyarakat		

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
	Pengembangan website PPID	Website PPID yang mudah diakses oleh masyarakat	
	Pengelolaan website cegah narkoba	Website cegah narkoba yang mudah diakses oleh masyarakat	
	Pengelolaan radio	Terkelolanya radio Badan Narkotika Nasional	
	Pengelolaan sosial media pencegahan	Terkelolanya sosial media sebagai media pencegahan	
	KIE keliling	Berjalannya KIE keliling	
	Pengendalian website rumah edukasi anti narkoba	Terkendalinya website rumah edukasi anti narkoba	
	Pengelolaan media sosial Badan Narkotika Nasional	Terkelolanya media sosial Badan Narkotika Nasional	
	Evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik	
	Pengelolaan website MADSYS (Manajemen Digital Sistem)	Peningkatan kualitas aplikasi madys.bnn.go.id	
	Pengelolaan website perpustakaan	Meningkatnya dan tersedianya informasi pada perpustakaan.bnn.go.id	
	Pembuatan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK)	Tersusunnya NSPK	
	Peningkatan dan pengembangan SDM arsiparis	SDM arsiparis yang dikembangkan dan ditingkatkan	
	Revisi regulasi arsiparis	Terevisinya regulasi arsiparis	
	Sosialisasi tata naskah dinas dan klasifikasi arsip	Tersosialisasikannya tata naskah dinas dan kode klasifikasi arsip	
	Pembuatan perka tentang penerbitan dan serah simpan karya cetak dan karya rekam	Tersusunnya perka tentang penerbitan dan serah simpan karya cetak dan karya rekam	
	Pengawasan kearsipan	Terawasinya kearsipan	
	Tata kelola arsip aktif	Arsip aktif yang tertata	
	Tata kelola arsip inaktif	Arsip inaktif yang tertata	
	Bimbingan teknis arsiparis	Terselenggaranya bimtek arsiparis dan pengelola	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
		arsip	
	Sosialisasi standar/ maklumat layanan laboratorium	tersosialisasikannya pedoman layanan laboratorium	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Pengembangan website sistem layanan laboratorium	Sistem layanan laboratorium yang berkembang	
	Pembuatan sistem layanan laboratorium online	Terbentuknya aplikasi layanan laboratorium online	
	Pengembangan sistem layanan laboratorium online	Peningkatan kualitas aplikasi layanan laboratorium online	
	Pengembangan SIM (Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi)	Peningkatan kualitas aplikasi layanan rehabilitasi	
	Pengelolaan SIELIN (Sistem E-Learning Terintegrasi)	Peningkatan kualitas aplikasi pelatihan	

4.3. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Program Penataan Tatalaksana

Program Penataan Tatalaksana							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan proses bisnis		Biro Kepegawaian		√		√	
Sosialisasi proses bisnis		Biro Kepegawaian		√		√	
Penyusunan SOP		Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
Sosialisasi SOP		Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
Evaluasi dan revisi SOP		Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
E-office	Pembuatan e- office	Puslitdatin	√				
	Sosialisasi dan pelatihan e-office	Puslitdatin		√			
	Pengembangan e-office	Puslitdatin				√	

	Monitoring dan evaluasi e-office	Puslitdatin	√	√	√	√	√
SRIKANDI (Sistem Rincian Kegiatan Individu)		Puslitdatin		√			
E-monev	Sosialisasi dan pelatihan e-monev	Biro Perencanaan		√			
	Pengembangan e-monev	Biro Perencanaan		√	√	√	√
	Monitoring dan evaluasi e-monev	Biro Perencanaan		√	√	√	√
Integrasi sistem	Integrasi sistem internal BNN	Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Integrasi sistem eksternal BNN	Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Integrasi JDIH BNN ke JDIH Nasional	Puslitdatin	√	√	√	√	√
SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba)	Pengembangan aplikasi SIRENA	Deputi Bidang Rehabilitasi	√	√	√	√	√
ARENA (Aplikasi Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana)		Biro Umum	√	√	√	√	√
Layanan informasi publik		Biro Umum	√	√	√	√	√
Pengembangan website JDIH		Puslitdatin	√	√	√	√	√
Pengembangan website BNN, BNNP, BNNK		Puslitdatin	√	√	√	√	√
Pengembangan website PPID		Puslitdatin	√	√	√	√	√
Pengelolaan website cegah narkoba		Deputi Bidang Pencegahan	√	√	√	√	√
Pengelolaan radio		Deputi Bidang Pencegahan	√	√	√	√	√
Pengelolaan sosial media pencegahan		Deputi Bidang Pencegahan	√	√	√	√	√
KIE keliling		Deputi Bidang Pencegahan	√	√	√	√	√
Pengendalian website rumah edukasi anti narkoba		Deputi Bidang Pencegahan	√	√	√	√	√
Pengelolaan media sosial Badan Narkotika Nasional		Biro Humas dan Protokol	√	√	√	√	√
Evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi		PPID (yang dijabat oleh Biro			√	√	√

publik		Humas dan Protokol					
Pengelolaan website MADSYS (Manajemen Digital Sistem)		Biro Humas dan Protokol	√	√	√	√	√
Pengelolaan website perpustakaan		Biro Humas dan Protokol	√	√	√	√	√
Pembuatan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK)	Pembuatan NSPK layanan informasi	Biro Humas dan Protokol		√			
	Review dan perbaikan NSPK layanan informasi	Biro Humas dan Protokol			√		√
	Penyusunan pedoman publikasi dan media sosial	Biro Humas dan Protokol	√				
	Review dan perbaikan pedoman publikasi dan media sosial	Biro Humas dan Protokol		√		√	
	Penyusunan panduan dan modul e-learning	PPSDM	√				
Peningkatan dan pengembangan SDM arsiparis	Pelaksanaan bimtek kearsipan	Biro Umum dan Kepegawaian	√	√	√	√	√
	Pelaksanaan diklat kearsipan	Biro Kepegawaian dan PPSDM	√	√	√	√	√
Revisi regulasi arsiparis	Pelaksanaan revisi Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang tata naskah dinas	Biro Umum		√			
	Pelaksanaan revisi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 5 tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip	Biro Umum	√				
Sosialisasi tata naskah dinas dan klasifikasi arsip		Biro Umum		√	√	√	√
Pembuatan perka tentang penerbitan dan serah simpan karya cetak dan karya rekam		Biro Humas dan Protokol	√				

Pengawasan kearsipan		Biro Umum	√	√	√	√	√
Tata kelola arsip aktif		Biro Umum	√	√	√	√	√
Tata kelola arsip inaktif		Biro Umum	√	√	√	√	√
Bimbingan teknis arsiparis		Biro Umum	√	√	√	√	√
Sosialisasi standar/ maklumat layanan laboratorium		Pusat Laboratorium	√	√	√	√	√
Pengembangan website sistem layanan laboratorium (lab.bnn.go.id ; lims.bnn.go.id)		Pusat Laboratorium	√	√	√	√	√
Pembuatan sistem layanan laboratorium online	e-labreport	Pusat Laboratorium	√	√			
Pengembangan sistem layanan laboratorium online	e-labreport	Pusat Laboratorium			√	√	√
Pengembangan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Rehabilitasi		Deputi Bidang Rehabilitasi	√	√	√	√	√
Pengelolaan SIELIN (Sistem E-Learning Terintegrasi)		PPSDM	√	√	√	√	√

5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Pada program penataan sistem manajemen SDM terdapat beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

5.1. Kegiatan

1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Penyusunan analisis jabatan
- b) Evaluasi analisis jabatan
- c) Penyusunan peta jabatan
- d) Evaluasi jabatan

2) Perhitungan kebutuhan pegawai : sub kegiatan dari kegiatan ini adalah penyusunan daftar susunan pegawai

3) Proyeksi kebutuhan SDM 5 tahun kedepan

Sub kegiatan dari kegiatan ini adalah:

- a) Penyusunan dokumen tentang kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan
- b) Evaluasi kebutuhan pegawai

- 4) Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama yang telah dihitung dan diformalkan
- 5) Assesment centre
- 6) HCDP (Human Capital Development Plan)
- 7) Pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)

5.2. Indikator Kinerja

Tabel 9. Program Penataan Sistem Manajemen SDM disertai dengan Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
Penataan Sistem Manajemen SDM	Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	Peningkatan kualitas manajemen SDM
	Perhitungan kebutuhan pegawai	Dokumen perhitungan kebutuhan pegawai	
	Proyeksi kebutuhan SDM 5 tahun kedepan	Dokumen proyeksi kebutuhan SDM 5 tahun kedepan	
	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama yang telah dihitung dan diformalkan	Dokumen perhitungan formasi jabatan	
	<i>Assesment centre</i>	Instrumen <i>assessment centre</i>	
	HCDP (<i>Human Capital Development Plan</i>)	Dokumen HCDP	
	SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)	Tersusunnya SIMPEG	

5.3. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Program Penataan Sistem Manajemen SDM							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Penyusunan analisis jabatan	Biro Kepegawaian		√			
	Evaluasi analisis jabatan	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
	Penyusunan	Biro		√			

Program Penataan Sistem Manajemen SDM							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	peta jabatan	Kepegawaian					
	Evaluasi jabatan	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
Perhitungan kebutuhan pegawai	Penyusunan daftar susunan pegawai	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
Proyeksi kebutuhan SDM 5 tahun kedepan	Penyusunan dokumen tentang kebutuhan pegawai 5 tahun kedepan	Biro Kepegawaian	√				
	evaluasi kebutuhan pegawai	Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama yang telah dihitung dan diformalkan		Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
<i>Assesment centre</i>		Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
<i>HCDP (Human Capital Development Plan)</i>		Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)		Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√

F. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pada program penguatan akuntabilitas kinerja terdapat beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

F.1. Kegiatan

- 1) Rapat pimpinan pendahuluan arah program kerja
- 2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan tahunan
- 3) Rapat kerja teknis unit eselon I
- 4) Perjanjian kinerja
- 5) Rapat koordinasi evaluasi kinerja kelembagaan
- 6) Diklat evaluasi SAKIP

- 7) Pembuatan kamus definisi operasional dan pengukuran kinerja
- 8) Sosialisasi arsitektur informasi kinerja kelembagaan kepada seluruh satker
- 9) Penyusunan Cascading Kinerja organisasi sampai dengan individu
- 10) Pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis digital (*e-performance*) yang mengintegrasikan antara organisasi dengan individu

F.2. Indikator Kinerja

Tabel 11. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja disertai dengan Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
Penguatan akuntabilitas kinerja	Rapat pimpinan pendahuluan arah program kerja	Notulen dan dokumentasi rapat pimpinan pendahuluan arah program kerja	Kinerja organisasi yang terukur
	Pelaksanaan musyawarah perencanaan tahunan	Dokumen laporan hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan tahunan	
	Rapat kerja teknis unit eselon I	Notulen dan dokumentasi rapat kerja teknis unit eselon I	
	Perjanjian kinerja	Ditetapkannya kinerja	
	Rapat koordinasi evaluasi kinerja kelembagaan	Notulen dan dokumentasi rapat koordinasi evaluasi kinerja kelembagaan	
	Diklat evaluasi SAKIP	Terselenggaranya diklat evaluasi SAKIP	
	Pembuatan kamus definisi operasional dan pengukuran kinerja	Dokumen kamus definisi operasional dan pengukuran kinerja	
	Sosialisasi arsitektur informasi kinerja kelembagaan kepada seluruh satker	Tersosialisasikannya arsitektur informasi kinerja kelembagaan kepada seluruh satker	
	Penyusunan Cascading Kinerja organisasi sampai dengan individu	Dokumen Cascading Kinerja organisasi sampai dengan individu	
	Pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis digital (<i>e-performance</i>) yang mengintegrasikan antara organisasi dengan	Sistem pengukuran kinerja berbasis digital	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
	individu		

F.3. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Waktu Pelaksanaan dan Penanggungjawab Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Rapat pimpinan pendahuluan arah program kerja		Biro Perencanaan	√	√	√	√	√
Pelaksanaan musyawarah perencanaan tahunan		Biro Perencanaan	√	√	√	√	√
Rapat kerja teknis unit eselon I		Masing-masing satker	√	√	√	√	√
Perjanjian kinerja		Biro Perencanaan	√	√	√	√	√
Rapat koordinasi evaluasi kinerja kelembagaan		Biro Perencanaan	√	√	√	√	√
Diklat evaluasi SAKIP		Biro Perencanaan	√	√	√	√	√
Pembuatan kamus definisi operasional dan pengukuran kinerja		Biro Perencanaan	√	√	√	√	√
Sosialisasi arsitektur informasi kinerja kelembagaan kepada seluruh satker		Biro Perencanaan	√	√	√	√	√
Penyusunan Cascading Kinerja organisasi sampai dengan individu		Biro Perencanaan	√		√		√
Pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis digital (<i>e-performant</i>) yang mengintegrasikan		Puslitdatin, Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian,	√	√	√	√	√

antara organisasi dengan individu		Biro Keuangan					
-----------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--

G. Program Penguatan Pengawasan

Pada program penguatan pengawasan terdapat beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

G.1. Kegiatan

- 1) Pengelolaan gratifikasi
Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :
 - a) Sosialisasi gratifikasi
 - b) Pemantauan
 - c) Evaluasi pengelolaan gratifikasi
- 2) Penguatan SPIP di satker
Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :
 - a) Sosialisasi
 - b) Pemantauan
 - c) Penilaian
 - d) Evaluasi
 - e) Penguatan kapasitas APIP
 - f) Panduan penguatan kapasitas
 - g) Pembinaan APIP
- 3) Pengelolaan pengaduan masyarakat
Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :
 - a) Penyusunan pedoman
 - b) Sosialisasi
 - c) Tindak lanjut pengaduan masyarakat
 - d) Pengembangan sistem digital
 - e) Evaluasi
- 4) Whistle blowing system
Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :
 - a) Sosialisasi
 - b) Tindak lanjut
 - c) Evaluasi
- 5) Penanganan benturan kepentingan
Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :
 - a) Sosialisasi
 - b) Tindak lanjut

- c) Evaluasi
- 6) Pembangunan zona integritas
Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :
 - a) Sosialisasi zona integritas
 - b) Asistensi pembangunan zona integritas
 - c) Penilaian zona integritas

G.2. Indikator Kinerja

Tabel 13. Program Penguatan Pengawasan disertai dengan Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
Penguatan sistem pengawasan	Pengelolaan gratifikasi	Terkelolanya gratifikasi	Terciptanya sistem birokrasi yang bersih
	Penguatan SPIP di satker	Terselenggaranya SPIP di satker	Sistem birokrasi yang terkendali
	Pengelolaan pengaduan masyarakat	Terkelolanya pengaduan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Whistle blowing system	Tersusunnya whistle blowing system	Terciptanya sistem birokrasi yang bersih
	Penanganan benturan kepentingan	Tertanganinya benturan kepentingan	
	Pembangunan zona integritas	Terbangunnya zona integritas	

G.3. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Program Penguatan Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan gratifikasi	Sosialisasi gratifikasi	Inspektorat dan semua satker	√	√	√	√	√
	Pemantauan	Inspektorat dan semua satker	√	√	√	√	√
	Evaluasi pengelolaan gratifikasi	Inspektorat dan semua satker	√	√	√	√	√

Program Penguatan Pengawasan							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan SPIP di satker	Sosialisasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Pemantauan	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Penilaian	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Evaluasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Penguatan kapasitas APIP	PPSDM	√	√	√	√	√
	Panduan penguatan kapasitas	PPSDM	√	√	√	√	√
	Pembinaan APIP	Inspektorat	√	√	√	√	√
Pengelolaan pengaduan masyarakat	Penyusunan pedoman	Inspektorat dan Puslitdatin	√				
	Sosialisasi	Inspektorat dan Biro Kepegawaian	√	√	√	√	√
	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	Inspektorat dan Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Pengembangan sistem digital	Inspektorat dan Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Evaluasi	Inspektorat dan Puslitdatin	√	√	√	√	√
Whistle Blowing System	Sosialisasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Tindak Lanjut	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Evaluasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
Penanganan benturan kepentingan	Sosialisasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Tindak Lanjut	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Evaluasi	Inspektorat	√	√	√	√	√
Pembangunan zona integritas	Sosialisasi zona integritas	Inspektorat dan Biro Humas dan Protokol	√	√	√	√	√
	Asistensi pembangunan zona integritas	Inspektorat	√	√	√	√	√
	Penilaian zona integritas	Inspektorat	√	√	√	√	√

H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

H.1. Kegiatan

Pada program peningkatan kualitas pelayanan publik terdapat beberapa kegiatan, diantaranya adalah:

1) Review dan perbaikan standar pelayanan dan SOP

Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :

- a) Review, perbaikan standar pelayanan dan SOP
- b) Review, perbaikan, dan penyusunan SOP
- c) Review atas standar pelayanan
- d) Review atas SOP

2) Standarisasi pelayanan laboratorium

Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :

- a) Penetapan standar pelayanan laboratorium
- b) Review standar pelayanan laboratorium
- c) Maklumat standar pelayanan laboratorium

3) Budaya pelayanan prima

Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :

- a) *Capacity building*
- b) *Reward and punishment* untuk pemberi layanan
- c) Sarana layanan terpadu
- d) Inovasi pelayanan
- e) Peningkatan kompetensi petugas layanan
- f) Sosialisasi budaya prima kepada internal
- g) Pemutakhiran pelayanan berbasis website
- h) Pengembangan pelayanan publik berbasis inovasi
- i) Pembuatan atribut pelayanan prima
- j) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik
- k) Review SOP pengaduan
- l) Pembentukan tim pokja pengaduan
- m) Rapat penyusunan tindak lanjut pengaduan
- n) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut
- o) Pelaksanaan survei
- p) Sosialisasi survei melalui media
- q) Evaluasi dan tindak lanjut hasil survei
- r) Pengembangan sistem informasi
- s) Penerapan sistem informasi
- t) Evaluasi dan perbaikan sistem informasi

- u) Tindak lanjut hasil evaluasi sistem informasi
- 4) Implementasi Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN 2020 – 2024

Sub kegiatan dari kegiatan tersebut adalah :

- a) Pelaksanaan tes urine
- b) Tindak lanjut hasil pelaksanaan tes urine
- c) Evaluasi hasil pelaksanaan tes urine
- d) Standarisasi pelayanan tes urine
- e) Pelaksanaan program desa bersih dari narkoba (bersinar)

H.2. Indikator Kinerja

Tabel 15. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik disertai dengan Indikator Kinerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	
		Output	Outcome
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Review dan perbaikan standar pelayanan dan SOP	SOP standar pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat
	Standarisasi pelayanan laboratorium	Dokumen standar pelayanan laboratorium	
	Budaya pelayanan prima	Tersusunnya budaya pelayanan prima	
	Implementasi Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN 2020 – 2024	Terlaksananya rencana aksi nasional P4GN sesuai dengan Instruksi Presiden	

H.3. Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab

Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab dari setiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Waktu pelaksanaan dan penanggung jawab Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Review dan perbaikan standar pelayanan dan	Review, perbaikan standar pelayanan dan	Deputi Bidang Rehabilitasi	√	√	√	√	√

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SOP	SOP						
	Review, perbaikan, dan penyusunan SOP	Balai Besar Rehabilitasi	√	√	√	√	√
	Review atas standar pelayanan	Balai/Loka	√	√	√	√	√
	Review atas SOP	Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
Standarisasi pelayanan laboratorium	Penetapan standar pelayanan laboratorium	Pusat Laboratorium Narkotika	√				
	Review standar pelayanan laboratorium	Pusat Laboratorium Narkotika		√		√	
	Maklumat standar pelayanan laboratorium	Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
Budaya pelayanan prima	<i>Capacity building</i>	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
	<i>Reward and punishment</i> untuk pemberi layanan	Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi, Loka Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
	Sarana layanan terpadu	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
	Inovasi pelayanan	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
	Peningkatan kompetensi	Deputi Bidang Rehabilitasi,	√	√	√	√	√

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	petugas layanan	PPSDM, BNNP/K,					
	Sosialisasi budaya prima kepada internal	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Balai Besar Rehabilitasi	√	√	√	√	√
	Pemutakhiran pelayanan berbasis website	Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Pengembangan pelayanan publik berbasis inovasi	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
	Pembuatan atribut pelayanan prima	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Deputi Bidang Rehabilitasi	√	√	√	√	√
	Review SOP pengaduan	Deputi Bidang Rehabilitasi	√	√	√	√	√
	Pembentukan tim pokja pengaduan	Deputi Bidang Rehabilitasi	√	√	√	√	√
	Rapat penyusunan tindak lanjut pengaduan	Deputi Bidang Rehabilitasi	√	√	√	√	√
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut	Deputi Bidang Rehabilitasi	√	√	√	√	√
	Pelaksanaan survei	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
	Sosialisasi hasil survei melalui media	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
Kegiatan	Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Evaluasi dan tindak lanjut hasil survei	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium Narkotika	√	√	√	√	√
	Pengembangan sistem informasi	Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Penerapan sistem informasi	Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Evaluasi sistem informasi	Puslitdatin	√	√	√	√	√
	Tindak lanjut hasil evaluasi sistem informasi	Puslitdatin	√	√	√	√	√
Implementasi Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN 2020 - 2024	Pelaksanaan tes urine	Deputi Bidang Dayamas	√	√	√	√	√
	Tindak lanjut hasil pelaksanaan tes urine	Deputi Bidang Dayamas	√	√	√	√	√
	Evaluasi hasil pelaksanaan tes urine	Deputi Bidang Dayamas	√	√	√	√	√
	Standarisasi pelayanan tes urine (review dan perbaikan SOP pelayanan tes urine)	Deputi Bidang Dayamas	√	√	√	√	√
	Pelaksanaan program desa bersih dari narkoba (bersinar)	Deputi Bidang Pencegahan	√	√	√	√	√

5. Quick Wins

Program percepatan (*Quick Wins*) adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. *Quick Wins* diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri yang

untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan image positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan reformasi birokrasi.

Quick wins adalah sebuah kegiatan yang dapat mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Quick wins merupakan kumpulan aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama, baik internal maupun eksternal lembaga. Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kegiatan yang mampu mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Narkotika Nasional.

A. Perumusan Quick Wins

Untuk dapat merumuskan *Quick Wins*, maka diperlukan identifikasi pemangku kepentingan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, yaitu:

1. Pemangku kepentingan utama adalah Badan Narkotika Nasional
2. Pemangku kepentingan pendukung adalah mitra kerja dan masyarakat
3. Pemangku kepentingan kunci adalah Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional

Berdasarkan penetapan pemangku kepentingan tersebut, maka sejumlah kandidat *Quick Wins* beserta *outcome* yang diharapkan ditentukan, yaitu:

Tabel 17. Kandidat Quick Wins

No.	Kandidat <i>Quick Wins</i>	Penanggung Jawab	<i>Output</i>	<i>Outcomes</i>
1.	Penyederhanaan Birokrasi	Biro Kepegawaian	Peraturan Badan tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN, BNNP, BNNK	Terwujudnya organisasi BNN yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.
2.	Harmonisasi produk hukum P4GN	Direktorat Hukum	Produk hukum yang berkualitas	Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan serta meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan

3.	Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Deputi Bidang Pemberantasan	Jumlah berkas, barang bukti dan aset sitaan	Peningkatan hasil pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta aset hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebesar 80% dari TPA (Tindak Pidana Asal)
4.	e-government	Puslitdatin	Sistem manajemen berbasis IT yang terintegrasi	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem, proses dan prosedur kerja organisasi dalam penggunaan teknologi informasi
5.	Whistle Blowing System	Inspektorat	Sistem pengaduan yang rahasia, efektif, dan aman	Meningkatnya partisipasi pegawai dalam pengawasan terhadap kesesuaian prosedur dan perilaku kerja guna menjaga integritas dan profesionalitas organisasi
6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Deputi Bidang Rehabilitasi, Pusat Laboratorium	Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
7.	Pengelolaan dan pembinaan kawasan rawan narkoba	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat binaan di kawasan yang dikelola dan dibina oleh program pemberdayaan alternatif	Terwujudnya masyarakat binaan yang meningkat strata sosial dan ekonomi dengan program pemberdayaan alternatif

B. Rencana pelaksanaan Quick Wins

Tahap persiapan untuk melaksanakan kegiatan *Quick Wins* sebagaimana tabel berikut sudah mulai dilakukan pada tahun ini. Adapun rencana pelaksanaan dan kegiatan *Quick Wins* digambarkan sebagai berikut :

Tabel 18. Rencana Pelaksanaan Quick Wins

No.	Quick Wins	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyederhanaan Birokrasi					
2.	Harmonisasi produk hukum P4GN					
3.	Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika					
4.	e-goverment					
5.	Whistle Blowing System					
6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik					
7.	Pengelolaan dan pembinaan kawasan rawan narkoba					

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro.

Pelaksanaan tingkat makro dan meso merupakan pelaksana Reformasi Birokrasi pada tingkat Nasional yang terdiri dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tingkatan meso, terdiri dari Tim Independen, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi, serta Tim *Quality Assurance*. Selanjutnya pada tingkatan Mikro yang merupakan pelaksana Reformasi Birokrasi institusional terdiri dari Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) atau Pemerintah Daerah. Berikut ilustrasi dari pelaksana Reformasi Birokrasi tersebut:

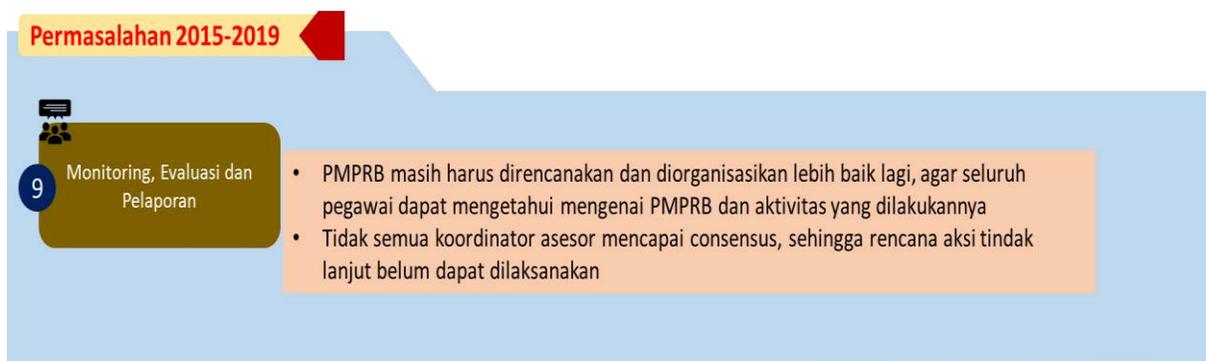


Gambar 20. Pelaksana Reformasi Birokrasi

Badan Narkotika Nasional sebagai salah satu institusi K/L dalam penyelenggaraan pemerintahan harus melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai pelaksana institusional pada tingkat Mikro.

4. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi suatu hal yang penting. Dalam perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi, di luar program yang langsung berkaitan dengan delapan area perubahan monitoring, evaluasi dan pelaporan menjadi satu program yang ditetapkan bagi pelaksana tingkat meso dan tingkat mikro. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang baik akan berdampak terhadap kinerja reformasi birokrasi, utamanya dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) yang memerlukan keterlibatan secara komprehensif oleh tim Reformasi Birokrasi dari tahap perencanaan hingga movev dan pelaporan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Permasalahan yang dihadapi selama ini dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut:



Gambar 21. Kondisi, Permasalahan dan Pencapaian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2015-2019

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja pada lingkup Badan Narkotika Nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Berikut hasil PMRB Badan Narkotika Nasional Tahun apabila dibandingkan dengan Nilai RB yang dikeluarkan oleh Kemenpan pada Tahun 2017 dan 2018:

Indeks Reformasi Birokrasi BNN 2017-2018					
	Komponen	Bobot	2017	2018	Mandiri
	Manajemen Perubahan	5.00	2.90	2.90	4,69
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.00	2.09	2.09	5,00
	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	4.01	4.01	5,83
	Penataan Tatalaksana	5.00	3.60	3.39	4,31
	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	12.58	12.69	14,42
	Penguatan Akuntabilitas	6.00	2.95	2.95	6,00
	Penguatan Pengawasan	12.00	7.68	7.00	11,02
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	3.88	4.31	5,90
A	Total Komponen Pengungkit	60.00	39.68	39.33	57,18
	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20.00	13.20	13.13	0,00
	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	8.16	9.18	3,00
	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8.04	8.80	0,00
B	Total Komponen Hasil	40.00	29.40	31.11	3,00
(A+B)	Indeks Reformasi Birokrasi	100.00	69.08	70.44	60,18

Gambar 22. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional 2017-2018 dibandingkan dengan PMRB 2018

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional untuk memantau perkembangan Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar konsisten dengan *Road Map* nasional dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Instansi untuk:
 - Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
 - Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level nasional untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

- a. Evaluasi tahunan di tingkat tim pelaksana reformasi birokrasi yang dipimpin kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat instansi yang dipimpin langsung oleh Ketua UPRBN;
- c. Evaluasi tahunan di tingkat Nasional, yang dipimpin langsung oleh Ketua TRBN.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
- c. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat/Pengawas Internal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

5. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* mampu dibiayai melalui penganggaran Badan Narkotika Nasional.

6. Sinkronisasi *Road Map* Dengan Rencana Strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi Badan Narkotika Nasional untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan Badan Narkotika Nasional.

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk perubahan organisasi menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, dan lebih dekat dengan masyarakat. Agenda reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga tertuang ke dalam sebuah Road Map Reformasi Birokrasi sebagai acuan dan pedoman.

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional periode 2020-2024 mencakup delapan area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia, penataan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Agar Road Map Reformasi Birokrasi ini dapat berjalan dengan baik, maka dukungan baik dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana pada Badan Narkotika Nasional sangat diperlukan. Dukungan tersebut ditujukan agar tujuan dari reformasi birokrasi dapat tercapai, yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu menjadi pelayan publik yang baik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO